

MEMBEDAH KERUKUNAN PASCA KONFLIK DI KOTA AMBON

Dissecting Post-Conflict Harmony in Ambon City

Arifuddin Ismail

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Jl. A.P.Pettarani No. 72 Makassar

Email : arif_litbang@yahoo.com/arifuddinismail07@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan refleksi “*Kerukunan Umat Beragama di Ambon Maluku*” dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Secara khusus penelitian ini fokus pada “segregasi pemukiman antara Muslim dengan Nasrani pasca konflik di Ambon. Salah satu kasus konflik yang menggoncangkan Indonesia, bahkan dunia adalah “Konflik Ambon”. Kejadiannya sudah berlangsung lebih dua dekade, dan secara faktual di permukaan menunjukkan kehidupan yang aman dan damai. Tentu dengan kebijakan pemerintah yang dari awal melakukan “*Segregasi Pemukiman*” antara Muslim dengan Nasrani pasca konflik. Ternyata di balik kedamaian terselubung banyak hal, sebagai dampak dari “*segregasi pemukiman*,” yaitu: 1. Melemahnya solidaritas kultural, dan menguatnya solidaritas keagamaan pada masing-masing umat beragama; 2. Melanggengkan rasa trauma masyarakat terhadap konflik yang mengerikan, artinya dengan pengalaman konflik Ambon memunculkan dampak psikologi yang berkepanjangan, dan berefek pada susahnyanya memulihkan dan mengembalikan kepercayaan (*trust*); 3 Interaksi yang terbangun bersifat formal dan semu di ruang-ruang publik. Masing-masing komunitas menjalani kehidupannya sendiri-sendiri, bahkan merasa enggan untuk saling berkunjung, dan membangun komunikasi yang lebih intens, sehingga terjadi jarak sosial di antara kedua komunitas; 4. Menciptakan sekat-sekat pemisah yang pada setiap komunitas memunculkan stigma negatif terhadap orang-orang yang berada di luar kelompoknya (*the other*), konteks ini terjadi ketegangan sosial yang sewaktu-waktu mencuat ke permukaan menjadi “konflik terbuka.” Kondisi masyarakat seperti di Ambon mengundang perhatian yang lebih intens guna membedah satu persatu fenomena psikologi sosial yang berada pada titik mengkhawatirkan. Pilihan utama yang harus dilakukan adalah bagaimana mengkondisikan masyarakat yang di dalamnya terbangun interaksi yang intens dan rajutan kasih sayang secara ikhlas dan simultan untuk menggapai kehidupan yang kondusif dalam kedamaian yang abadi

Kata kunci: Kerukunan, Umat Beragama, Segregasi Pemukiman, Interaksi Sosial.

Abstract

This research is intended for reflection “Religious Harmony in Ambon” using a qualitative approach. Specifically as focusing on “segregation of settlements between Muslims and post-conflict Christianity in Ambon. One of the conflicts that shook Indonesia, even the world is the “Ambon Conflict”. The incident has been going on for more than two decades, and factually on the surface appears to show a safe and peaceful life. Of course with a prescription government policy that from the beginning do “Segregation Settlements” between Muslims and post-conflict Christians. It turns out that behind the hidden peace of many things, as a result of “settlement segregation,” namely: 1. The weakening of cultural solidarity, and the strengthening of religious solidarity in each religious community; 2. To perpetuate the sense of community trauma to horrible conflicts, meaning that the experiences of the Ambon conflict have resulted in a prolonged psychological impact, and have an effect on the difficulty of restoring and restoring trust; 3 The built interaction is only formal and false in the public spaces. Each community lives its own life, and even feels reluctant to visit each other, and builds more intense communication, resulting in social distance between the two communities; 4. Creating barriers of separation which in each community creates a negative stigma against people outside the group, and this context occurs social tensions that at times rise to the surface into “open conflict.” Conditions of society like in Ambon invite more intense attention to dissect one by one psychosocial phenomenon that is at the point of worrying. The main choice that must be done is how to condition the society in which woke up intense interaction and knit affection sincerely and simultaneously to reach life conducive in lasting peace

Key word : harmony, religious, segregation of settlement, social interaction

PENDAHULUAN

Secara historikal menunjukan, beberapa peristiwa konflik yang bernuansa “Sara” di Indonesia terjadi di penghujung pemerintahan Orda Baru, dan awal pemerintahan Reformasi yaitu Konflik Sambas dan Pontianak di Kalimantan Barat, Jakarta, Jawa Timur, Konflik Maluku Utara, Konflik Poso Sulawesi Tengah, dan “Konflik Ambon” Maluku. Dua konflik yang disebutkan terakhir (Poso dan Ambon) cenderung bernuansa agama. Searah dengan ini diungkapkan juga oleh Imam Tholhah di dalam Jurnal Harmoni (2002: 9).

Konflik di Ambon yang melibatkan umat Islam dan Nasrani telah berlalu, pihak pemerintah telah memfasilitasi pertemuan perdamaian melalui “Deklarasi Malino 2”, semua pihak sepakat untuk hidup dalam kedamaian. Salah satu tindak lanjut dari deklarasi Malino 2 yang difasilitasi pemerintah adalah dengan melakukan “Segregasi Pemukiman”, yaitu menempatkan kelompok (komunitas) penduduk dalam satu lokasi tertentu secara homogen, tanpa dicampuri oleh kelompok lain. Muslim ditempatkan di lokasi tersendiri, yaitu di “Kampung Batu Merah” dan “Kebon Cengkeh”, sedangkan Umat Nasrani juga ditempatkan di daerah “Kuda Mati”. Dua kelompok tersebut hidup pada masing-masing komunitasnya, dan terpisah satu sama lain.

Interaksi sosial yang terbangun hanya berkisar pada sesama komunitas (*internal interaction*). Tidak ada lagi interaksi antar komunitas umat beragama yang terbangun di daerah-daerah tersebut, sehingga yang memungkinkan bisa dilakukan adalah masing-masing kelompok atau komunitas menata diri, baik secara personal maupun dalam hubungan yang lebih luas. Lewis A Cooser mengungkapkandi dalam buku “*the Function of Social Conflict*”, bahwa konflik tidak selamanya merugikan, karena kondisi optimum suatu organisasi bukan kompromi antara konflik dan integrasi melainkan berkembang dari keduanya secara simultan. Kelompok-kelompok yang terpecah sebagai akibat terjadinya konflik, masing-masing akan memperkuat identitas diri atau kelompoknya dan melindunginya agar tidak leburke dalam dunia sosial di sekelilingnya. Ini diistilahkan dengan “*Cohesi*” (Coser, 1956: 33-95)

Berbeda dengan sebelum terjadinya konflik di Ambon, orang Nasrani dan Umat Islam hidup bersama dalam satu daerah (lokasi) tertentu, tanpa ada sekat-sekat yang membatasi, baik dari sisi etnis, suku bangsa maupun agama. Setiap saat mereka

berinteraksi satu sama lain secara akrab dalam hubungan sosial dan kultural, sehingga tampak lebih tenang dan damai. Ketika terjadi konflik, semuanya jadi berantakan, porak-poranda, kedamaian yang dibangun selama puluhan tahun hancur seketika.

Kondisi seperti itu tidak dibiarkan berlarut-larut, pemerintah mengambil kebijakan pengatasan konflik dengan melakukan penataan pemukiman, yaitu memisahkan kedua komunitas (Muslim dengan Nasrani) yang sedang berkonflik atau yang diistilahkan dengan sistem *segregasi*. Kebijakan tersebut berlangsung hingga saat ini, dan tampak di permukaan masyarakat Ambon dalam keadaan tenang, hidup penuh kedamaian. Akan tetapi, rupanya hidup terpisah antar komunitasmenimbulkan beberapa efek yang bisa mengarah kepada munculnya disintegrasi di antara mereka,efek yang dimaksud, sebagai berikut:

1. *Kedamaian* yang terbangun pasca konflik antara Muslim dengan Nasrani sudah berlangsung sekitar dua dasawarsa, tampaknya hanya di permukaan, dan secara *psikologi* bersifat semu, terdapat jarak sosial di antara kedua komunitas. Masing-masing komunitas menjalani kehidupannya sendiri-sendiri, satu sama lain merasa enggan untuk saling berkunjung, dan membangun komunikasi yang lebih intens;
2. *Segregasi Pemukiman* telah menciptakan sekat-sekat pemisah, pada setiap komunitas memunculkan stigma negatif terhadap orang-orang yang berada di luar kelompoknya. Bagi Muslim akan menganggap orang-orang non Muslim (Nasrani) sebagai orang lain atau “*the other*”, demikian sebaliknya, dan kalau sudah kenyataannya seperti itu, berarti sudah ada ketegangan sosial yang bisa mengarah ke konflik;
3. *Segregasi Pemukiman* membuat terpisahnya dua kelompok komunitas Muslim dangan Nasrani sebagai kelompok yang berdiri sendiri, tanpa adanya pembauran dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Masing-masing komunitas akan memperkuat diri atau komunitasnya, bahkan melakukan konsolidasi internal secara terprogram yang dipersiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan buruk yang terjadi;
4. Interaksi yang terbangun hanya melalui hubungan-hubungan formal di kantor, sekolah dan fasilitas umum lainnya. Hubungan atau interaksi tersebut dilakoni hanya dalam kaitannya dengan tugas, juga untuk pemenuhan

kebutuhan sesaat, bahkan tidak berbekas di hati, tampak terdapat perasaan curiga mencurigai dan tidak saling mempercayai, hubungan seperti itu bersifat tidak langgeng.

5. *Segregasi Pemukiman* membuat umat beragama pada masing-masing komunitas mengalami ketidaknyamanan dalam menjalani hidup. Mereka diliputi perasaan was-was dan selalu diliputi rasa kecurigaan dalam membangun komunikasi di antara mereka. Kalau dalam satu kehidupan bermasyarakat selalu muncul rasa curiga-mencurigai, maka kehidupan sosial masyarakat itu sudah tidak sehat, atau ada yang perlu diperbaiki.

Berdasar pada kondisi-kondisi tersebut, diasumsikan, bahwa interaksi sosial yang terbangun atas dasar hubungan formal yang tidak intens berakibat pada semakin lemahnya rajutan kasih sayang sebagai perakat dalam suatu kehidupan sosial masyarakat, dan kemungkinan terbukanya peluang gesekan, persaingan dan konflik semakin besar. Terlepas dari statemen Lewis A. Coser (1956: 33) yang menganggap konflik yang terjadi di masyarakat adalah suatu hal yang lumrah atau wajar. Akan tetapi perlu belajar dari pengalaman ketika terjadi konflik Ambon 1998, efek yang ditimbulkan sangat merugikan masyarakat dan bangsa Indonesia. Nyawa yang melayang tidak terhitung jumlahnya, ribuan orang yang terluka dirawat di rumah sakit, banyak orang yang kehilangan tempat tinggal, orang tua terpisah dari anak-anaknya, pelajar dan mahasiswa banyak yang morat marit, bahkan meninggalkan sekolah dan kampusnya, para pebisnis dan pedagang kehilangan aset hanya karena tindakan penyelematan diri.

Memang tampak di permukaan, umat beragama di Ambon sudah rukun, tidak ada lagi konflik yang mengatasnamakan umat beragama atau menggunakan simbol-simbol agama. Akan tetapi, perlu melihat kembali model *segregasi* pemukiman seperti yang ada selama sekitar 16 (enam belas) tahun untuk mengevaluasi apakah masih perlu dipertahankan atau tidak bisa diberlakukan seterusnya, atau tetap seperti sekarang, tetapi dilakukan pembenahan perbaikan di beberapa sektor yang dianggap masih lemah. Inilah yang membuat peneliti tertarik untuk menelusuri kembali kebijakan pemerintah dalam mengatasi konflik melalui “*Segregasi Pemukiman*”.

Berdasar pada latar belakang di atas, maka permasalahan pokok yang diangkat adalah “Bagaimana Kerukunan Terbangun setelah

Dilakukan Segregasi Pemukiman antara Muslim dengan Nasrani Pasca Konflik di Ambon”. Permasalahan pokok ini kemudian dijabarkan ke dalam pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena komunitas Muslim dan Nasrani yang hidup dalam *segregasi Pemukiman* pasca konflik.
2. Bagaimana pemahaman masyarakat Maluku terkait dengan segregasi pemukiman yang ada serta respons mereka terhadap kebijakan tersebut?
3. Apa dampak segregasi pemukiman dalam kaitan dengan kondisi psikososial masyarakat yang nampak melalui pola interaksi masyarakat tersegregasi dalam membangun hubungan secara damai?
4. Apa kebijakan yang ditempuh dalam menjembatani kehidupan masyarakat pasca tersegregasi?

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mengungkap Kerukunan yang terbangun setelah dilakukan Segregasi Pemukiman antara Muslim dengan Nasrani Pasca Konflik di Ambon. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mengungkap: Bagaimana fenomena komunitas Muslim dan Nasrani yang hidup dalam segregasi Pemukiman pasca konflik; Pemahaman masyarakat Maluku terkait dengan segregasi pemukiman yang ada serta respons mereka terhadap kebijakan tersebut; Dampak segregasi pemukiman dalam kaitan dengan kondisi psikososial masyarakat yang nampak melalui pola interaksi Masyarakat tersegregasi dalam membangun hubungan secara; Kebijakan yang ditempuh sebagai upaya menjembatani kehidupan masyarakat yang tersegregasi.

Tinjauan Pustaka

Penelitian terkait dengan persoalan kerukunan umat beragama dalam konteks kemajemukan Indonesia telah dilakukan oleh banyak peneliti. Mujiburrahman dalam penelitiannya membahas kedudukan agama dalam negara Pancasila dengan menyebutkan bahwa Pancasila menjadi titik temu bagi berbagai elemen bangsa, dan salah satu fungsi Pancasila adalah menjamin kebebasan beragama (Mujiburrahman, 2009: 46-50). Terkait dengan kerukunan umat beragama Yewangoe dalam penelitiannya melihat persoalan “Regulasi Toleransi dan Pluralisme Agama di Indonesia”, dengan menggunakan perspektif sosiologi mengungkapkan fakta pluralisme dengan mengatakan bahwa

dalam masyarakat selalu ada berbagai kelompok masyarakat, yang keberadaannya dikonkretisasikan dalam berbagai lembaga sosial yakni suku, agama bahkan kepen-tingan (politik dan ekonomi). Oleh sebab itu diperlukan regulasi yang menata toleransi sebagai suatu bentuk konsistensi terhadap realitas keberagaman yang ada (Yewangoe, 2009: 76-83).

Bagi Yewangoe, fakta pluralisme yang nampak melalui keragaman agama, suku bahkan lembaga-lembaga sosial lainnya termasuk kepentingan politik dan ekonomi yang berbeda merupakan ancaman, sehingga membutuhkan suatu regulasi dalam menata keberagaman tersebut. Hal ini bisa dilihat dari berbagai konflik yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia baik antara agama seperti di Ambon, Poso dan konflik antar suku yang terjadi di Sambas, maupun konflik internal agama yang terjadi antara kelompok Islam tertentu dengan Syiah, maupun Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI).

Flavius Andries dalam penelitian terkait dengan minoritas dalam masyarakat majemuk dengan mengangkat kasus Jemaah Ahmadiyah Indonesia di Kuningan dan Yogyakarta, mengungkapkan bahwa salah satu faktor penyebab konflik antar agama adalah adanya kepentingan politik baik apda level nasional maupun lokal. Karena itu ia berkesimpulan bahwa konflik antar Ahmadiyah dan Islam di Kuningan disebabkan karena kepentingan politik lokal.

Persoalan kemajemukan umat beragama mendapat perhatian serius pula dari Antropolog, Clifford Geertz, sebagaimana dikutip oleh Bahrul Hayat, di dalam buku “Mengelola Kemajemukan Umat Beragama” (2012 : 10) bahwa “bangsa Indonesia yang memilki keanekaragaman agama, etnik, dan budaya merupakan potensi sosiokultural, seharusnya dikelola dengan baik, kalau tidak begitu, maka besar kemungkinan akan terjadi gesekan-gesekan kultural yang berujung ketidak-stabilan politik dan integrasi bangsa. Searah dengan itu, Bahrul Hayat mempertegas, bahwa “Kemajemukan bangsa seyogyanya dikelola sebagai kekuatan dan potensi yang dapat didayagunakan untuk memajukan negara dan bangsa, bukan menjadi sumber pemicu disintegrasi bangsa (Bahrul Hayat, 2012: 14). Hal ini perlu dijadikan inspirasi, dalam membangun dan memperkuat kohesi sosial. Demikian juga untuk menjaga kemungkinan hilangnya spirit berbangsa dan bernegara yang berbasis multikultur. Hal itu sangat membantu dalam memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kesatuan

yang memiliki semboyan *bhinneka tunggal ika* (Muhammad, 2013: 107).

Khusus yang terkait dengan hubungan umat beragama, pemerintah telah mencanangkan berbagai hal. Salah satunya adalah *Trilogi Kerukunan Umat Beragama* yang dicanangkan oleh Kementerian Agama ketika dipimpin A. Mukti Ali dilanjutkan dengan membentuk forum musyawarah antarumat beragama dan konsep *unity in diversity* atau *agree in disagreement*. Forum dialog tersebut kemudian dilanjutkan oleh H. Alamsyah Ratu Perwiranegara dengan membentuk Badan Musyawarah Antarumat Beragama dan mengembangkan konsep trilogi kerukunan, yaitu kerukunan intern umat beragama, kerukunan antarumat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Pandangan terhadap kerukunan tersebut sangat penting untuk disosialisasikan dan dipraktikkan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan (sekali pun banyak perbedaan) sehingga nilai-nilai kerukunan bisa menjadi modal sosial penopang pembangunan (Muhammad, 2013: 125—128).

Secara khusus terkait dengan persoalan segregasi pemukiman dalam konteks Maluku pasca konflik telah dilakukan oleh banyak peneliti. Subair dan kawan-kawan (2008) dengan judul penelitian “Segregasi pemukiman berdasar Agama: Solusi atau ancaman?” Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi filosofis atas interaksi sosial antara orang Islam dan orang kristen pasca Konflik 1999-2003 di Kota Ambon. Kesimpulannya, bahwa segregasi pemukiman masyarakat berdasarkan agama Maluku sesungguhnya bukan fenomena baru. Pemerintah kolonial memberikan kontribusi cukup signifikan untuk melahirkan kondisi segregasi agama untuk mempermudah kontrol sosial mereka terhadap masyarakat jajahan. Subhair mengatakan bahwa segregasisosial tidak saja merambah wilayah fisik-geografis, tetapi juga terlestarikan melalui kodifikasi personal dalam ruang publik. Singkatnya, Agama menjadi hal yang sifatnya tendensius dalam persoalan segregasi di Maluku.

Dari pemaparan di atas jelas bahwa isu kerukunan beragama dan persoalan *segregasi pemukiman* bukan hal baru yang diteliti dalam dunia akademik. Namun peneliti merasa tertarik untuk tetap meneliti masalah tersebut dengan alasan bahwa ada aspek yang tidak tersentuh oleh peneliti sebelumnya terkait dengan persoalan restorasi justice dan trauma healing, sebaliknya aspek budaya menjadi hal primadona. Demikian

juga pada persoalan segregasi pemukiman pasca konflik. Peneliti sebelumnya menekankan pada aspek kultural dan fakta sejarah dan geografis. Wacana-wacana perdamaian yang bertendensius politik seperti Maluku sebagai laboratorium perdamaian, serta kampung multikulturalisme tidak menjadi focus kajian peneliti sebelumnya. Hal ini yang menjadi urgensi dan originalitas dari penelitian penulis dari penelitian sebelumnya.

Dari aspek teoritik penelitian ini merujuk pada konsep-konsep *civil society*. Gagasan *Civil society* muncul sebagai reaksi terhadap adanya praktek hegemoni dan dominasi negara, serta berbagai institusi di dalamnya yang terstruktur secara formal melalui kekuasaan publik. Institusi-institusi yang dimaksudkan adalah parpol, perserikatan dagang, kelompok penekan sudah di birokratisasikan serta melenceng jauh dari konsistensi mereka. Dalam bahasa Habermas, institusi-institusi birokrasi ini telah mengkolonisasi kehidupan rakyat, sehingga menjadi tugas masyarakat sipil untuk memulihkan komunikasi dan struktur pendukung komunitas diantara penduduknya. Masyarakat sipil juga bertugas menjaga etos yang berbeda dari negara, birokrasi dan ekonomi. Masyarakat sipil dikonseptualisasikan sebagai sebuah ruang tempat rakyat dapat mengejar tujuan yang mereka tentukan sendiri dalam sebuah area dalam suatu ruang bersama, serta memelihara dan menyokong penghuninya daripada saling meng-kontrol diantara mereka (Chandoke, 2001: 2).

Civil society bukan organisasi yang membentuk kolektivitas sosial yang lemah. *Civil society* memiliki kekuatan sosial serta kekuatan politik sehingga bukan lagi menjadi objek dari kepentingan negara semata-mata. Konteks ini disebabkan karena pada dasarnya *civil society* bersifat otonom, mandiri dari negara dan terikat dalam tatanan nilai bersama (Diamond, 2003). *Civil society* berada dalam suatu interaksi yang bisa saja ada dalam kontestasi dengan negara demi kepentingan masing-masing. Oleh sebab itu, perlu ada semacam kontrak sosial antara negara dan warga negara yang menghormati hak-hak individu untuk mencegah peran dominan negara (absolut). Peran negara dalam membuat regulasi yang harus ditaati untuk melindungi *civil society* dari konflik tetap diperhatikan.

Terkait dengan kondisi ini maka kebebasan yang mendasar terutama kebebasan menganut agama dan keyakinan adalah nilai tertinggi dan harus dihormati. Prinsipnya setiap individu

diberikan kebebasan untuk menentukan caranya sendiri menemukan kebenaran dan jalan menuju Tuhannya. Penggunaan teori *civil society* dalam penelitian ini sebagai pisau analisis untuk melihat bagaimana relasi sosial di tingkat masyarakat yang tersegregasi dijalankan melalui hubungan social; dan bagaimana peran *civil society* dari komunitas tersegregasi di Maluku diimplementasikan pada dssemua level atau tingkatan sosial

METODE

Penelusuran terhadap Kerukunan antara Muslim dan Nasrani Pasca Konflik di Ambon dikategorikan sebagai penelitian “evaluasi”, yaitu ingin melihat kembali kebijakan pemerintah yang memberlakukan “segregasi pemukiman”. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini dilakukan dalam wilayah Kota Ambon, pertimbangannya adalah Kota Ambon sebagai *Conflict Centre*, dari sini awal dimulainya konflik komunal dan merembes ke berbagai daerah di Provinsi Maluku. Di Kota Ambon juga bermula diterapkannya kebijakan “segregasi pemukiman” antara Muslim dan Nasrani pasca konflik. Pilihan sasaran lokasi akan mempertimbangkan secara *purposive* kantong-kantong yang termasuk wilayah “segregasi pemukiman Muslim dan Nasrani”, khususnya yang memiliki hal-hal yang krusial, dan kasus-kasus yang menarik dalam kaitannya dengan tujuan penelitian.

Sasaran penelitian ini adalah komunitas Muslim dan Nasrani sebagai komunitas yang terlibat dalam konflik Ambon, dan saat ini menjadi bagian dari kebijakan pemerintah tentang “segregasi pemukiman.” Sasaran penelitian sekaligus menjadi sumber data, yaitu orang-orang yang dianggap pantas memberikan informasi terkait data yang dicari. Warga dari masing-masing komunitas (Muslim dan Nasrani) yang dijadikan sasaran akan dipertimbangkan keterpilihannya.

Ada 2 (dua) jenis data yang ditelusuri, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data inti, yaitu: 1) pola hidup dalam masing-masing komunitas Muslim dan Nasrani yang dibangun setelah konflik Ambon, dan saat melakoni segregasi pemukiman; 2) Segmen-segmen terjadinya interaksi antara Muslim dan Nasrani dalam menjalani segregasi pemukiman pasca konflik di Ambon yang membuat mereka semakin merasa nyaman atau merasa tidak nyaman; 3) Pola interaksi yang dilakukan pada masing-masing komunitas Muslim dan Nasrani, baik secara *internal* maupun

secara eksternal yang bisa dikembangkan dalam hubungan yang lebih *intens*; 4) Kearifan baru dalam menjalin hubungan yang lebih luas antar komunitas dan memungkinkan diber-lakukan secara berkesinambungan; 5) Upaya dari komunitas Muslim dan Nasrani membangun strategi dan langkah-langkah yang lebih ril untuk menangkal munculnya pengaruh-pengaruh eksternal yang bisa merusak kerukunan. Data sekunder ialah data yang terkait dan mendukung substansi data primer sesuai dengan jenis data dan tujuan penelitian.

Data primer dan data sekunder akan diambil dari sumber yang dianggap akurat, sehingga bisa terjamin tingkat validitasnya. Terkait dengan sumber data dalam penelitian ini, maka unsur pemberi informasi yang dianggap tingkat akurasi lebih tinggi akan ditelusuri melalui “informan penelitian”. Informan penelitian terdiri atas: 1) informan kunci, yaitu para pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan tokoh agama; 2) informan ahli adalah para tokoh masyarakat, tokoh agama dan orang-orang yang terlibat langsung dalam peristiwa konflik Ambon yang saat ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah tentang segregasi pemukiman; 3) informan biasa, yaitu umat Muslim dan Nasrani yang terlibat langsung dalam peristiwa konflik Ambon, dan saat ini ikut dalam kebijakan pemerintah terkait dengan segregasi pemukiman.

Dalam kaitannya dengan pengumpulan data, digunakan metode yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu teknik wawancara dan observasi (Cresswell, 1994). Dari penggunaan metode ini diharapkan bisa menjaring data yang lebih mendalam, terutama yang terkait substansi yang dicari, tentu mengacu pada ketentuan dalam prosedur penelitian kualitatif, bahwa materi wawancara diformulasi secara longgar sesuai konteks, apalagi peneliti itu sendiri yang menjadi *instrumen* (Sugiyono, 2010: 305).

Penelitian kualitatif memandang data adalah salah satu *core* (inti) dalam penelitian. Dari awal pengumpulan data, prosedur kerja penolahan data sudah dimulai, artinya data yang dijaring sudah mulai dilihat secara cermat substansi dari data tersebut, berarti “pengolahan” dan “analisis” terhadap data sudah dilakukan. Kegiatan pengolahan dan analisis data secara terus menerus dilakukan seiring dengan pengumpulan data hingga selesainya penulisan laporan. Penggunaan teknik pengolahan dan analisis data disesuaikan dengan substansi data dan tujuan penelitiann.

Proses pengolahan dan analisis data tidak berhenti sampai pada pengelompokan dan penguraian dalam bentuk deskripsi, akan tetapi juga dilakukan pelaaahan secara kritis terhadap data yang dihipun dengan mendiskusikannya dari berbagai perspektif teoritis. Jadi aktivitas pengolahan dan analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif secara terus menerus hingga berakhirnya penelitian, atau mencapai tingkat kejenuhan data (Miles and Huberman, 1984).

PEMBAHASAN

Segregasi Pemukiman Sebagai Warisan Kolonial

Secara sosiologis maupun demografis masyarakat terkotak-kotak berdasarkan identitas kultural adalah petanda dan penanda yang disebabkan oleh konflik. Subair dalam bukunya menjelaskan bahwa secara umum konteks Maluku dari aspek historis terdapat jejak konflik bernuansa agama yang telah berlangsung sejak lama, yaitu sejak Belanda menginjakkan kaki di bumi Maluku pada tahun 1598, diperkuat lagi pada kedatangan keduanya tahun 1605 (Subair, 2008: 9). Belanda dengan siasat anti Portugis yang lebih dulu masuk di Maluku membuat mereka mendapat simaptik dari rakyat Maluku baik di Ternate, Tidore, Halmahera dan Ambon.

Berdasarkan penjelasan Subhair, bahwa Kristen menyebar luas di Maluku terutama di wilayah selatan, sedangkan pada bagian utara banyak yang memeluk agama Islam karena pengaruh Ternate. Peta seperti ini juga nampak jelas terjadi di pulau Ambon. Di bagian Utara yang disebut jazirah Leihitu banyak di huni warga Muslim, sebaliknya pada bagian selatan yang di sebut jazirah Leitimor di huni oleh warga yang beragama Kristen. Ini menunjukkan secara jelas bentuk segregasi pemukiman berbasis agama.

Polarisasi masyarakat Maluku juga sudah terbentuk berkaitan dengan pekerjaan. Bagi penduduk yang beragama kristen memiliki pekerjaan yang sebagian besar berada pada wilayah yang berdekatan dengan lingkungan pemerintahan Hindia Belanda, baik secara sipil maupun militer. Sebaliknya penduduk yang beragama Islam kurang melakukan relasi yang berpengaruh terhadap pekerjaan mereka, sehingga mereka lebih banyak berkerja pada bidang perdagangan, pertanian secara bersama dengan pedagang yang dari Bugis, Makasar, Cina dan Arab. Pola pemukiman dan pekejaan seperti itu, benih konflik mulai dirasakan

diantara komunitas masyarakat Maluku (Subair, 2008: 10).

Pola segregasi pemukiman secara khusus di kota Ambon juga berlangsung berbasis agama. Subhair dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pola pemukiman Kristen-Islam di kota Ambon berdasarkan sekat-sekat agama sebagai pembatas dilakukan secara tegas. Hanya ada sedikit dari daerah-daerah yang dihuni oleh dua komunitas secara bersamaan seperti Muslim di Desa Lata yang berasal dari Buton yang mayoritas orang Kristen, di desa Nusaniwe yang mayoritas Kristen juga terdapat orang-Islam yang berasal dari suku Buton. Di Beberapa tempat lain juga seperti di Desa Urimesing daerah Kristen juga dihuni beberapa komunitas Islam yang berasal dari Buton.

Wilayah Waihaong, Silale, Jalan Baru dan sekitarnya termasuk Ponogoro yang mayoritas beragama Islam juga di huni oleh orang Kristen asli Ambon. Suatu gambaran konkrit yang memperlihatkan bahwa pola segregasi pemukiman telah menjadi tradisi orang Maluku termasuk kota Ambon. Hal menarik yang perlu dilihat adalah bahwa desa Muslim yang penghuninya adalah orang asli Maluku hanya ada di desa Batu Merah yang dalam perkembangan kemudian juga dihuni oleh orang-orang Kristen termasuk muslim lainnya yang berasal dari kelompok migran. Sebuah gambaran jelas pola segregasi pemukiman berbasis agama di Maluku baik secara umum maupun secara khusus di kota Ambon telah terjadi sejak zaman kolonial. Hal menarik yang perlu dilihat bahwa keterlibatan suku-suku lain di wilayah Maluku maupun secara khusus di kota Ambon, dari mereka lah pola segregasi itu mencair.

Laporan penelitian Tim Universitas Pattimura yang dikutip oleh Subhair menjelaskan bahwa perincian daerah hunian di kota Ambon berbasis agama dahulu yang disebut kota Ambon (lama) hanya seluas 42 ha dan dihuni oleh 108.500 jiwa penduduk. Wilayah tersebut hanya satu kecamatan yaitu Sirimau. Penduduk Islam bertempat tinggal mayoritas di Batumerah, Waihaong dan sebagian besar Tanah lapang Kecil, Diponegoro dan Jalan Baru. Kelompok Kristen mayoritas tinggal di Mardika, Belakang Soya, Tanah Tinggi, Batu Meja, Batu Gajah, Urimesing, Pohon Pule, Perigi Lima dan Batu Gantung. Kemudian kota Ambon dimekarkan menjadi tiga kecamatan maka kelompok Islam menambah wilayah hunian pada daerah Waringin, Wainitu, kebun Cengkeh, kapaha, Batu Gong, Nania dan Wailete serta daerah perbukitan atau daerah

gunung yang didiami mayoritas orang Kristen. Dengan pemekaran wilayah kota Ambon maka penyebaran masyarakat Kristen semakin pesat pada ketiga wilayah kecamatan, Baguala, Nusaniwe, dan kecamatan Sirimau (Subair, 2008: 11).

Berdasarkan keterangan di atas maka jelas bahwa pola segregasi pemukiman telah menjadi suatu realitas konkrit masyarakat Maluku dan kota Ambon secara khusus. Namun suatu hal yang nampak dalam pola segregasi itu peran para migran secara khusus dari suku Buton, Bugis, Makasar, Jawa China dan Arab mereka yang kemudian berbaur dalam kehidupan sosial dengan masyarakat Ambon yang beragama Kristen karena faktor ekonomi. Hal ini menjadi penanda bahwa peranan kaum migran menjadi penting dalam mencairkan kebakuan relasi Islam-Kristen yang tersekat melalui segregasi pemukiman.

Kelompok migran inilah yang menghapuskan batas-batas teritori (boundary territory) baik Islam maupun Kristen melalui jalur perdagangan. beragama Islam di kota Ambon lebih berorientasi pada pertanian dan perdagangan sebagian dari mereka adalah nelayan.

Konflik 1999 kembali membuka lembaran kelim kehidupan sosial kemasyarakatan diantara dua komunitas. Pasca konflik, pemukiman masyarakat yang dibuat oleh pemerintah maupun atas bantuan sektor swasta dilakukan atas pertimbangan agama. Kehidupan tersekat-sekat sebagai budaya yang terselubung kini kembali muncul menjadi suatu fakta sosial. Pada saat konflik relasi terputus diantara kedua komunitas. Ruang-ruang sosial perkantoran, pendidikan bahkan sektor niaga juga seakan lumpuh.

Intervensi negara sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik salah satunya dilakukan melalui jalur perundingan atau dialog. Perjanjian Malino adalah satu wujud intervensi tersebut, yang melaluinya lahir butir-butir perjanjian yang menampakan nada kebencian, sekaligus protes atas ketidakadilan. Saling menuduh dan muncul pengakuan melalui konflik, ada istilah identitas teroris yang harus diakui oleh komunitas Islam melalui lascar Jihad, sementara separatis melalui gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) yang harus diakui oleh orang Kristen.

Keputusan lain dari Malino yang berdampak signifikan dalam membangun relasi kehidupan di Maluku dan kota Ambon pasca konflik adalah terkait dengan perimbangan. Keputusan perimbangan ini akhirnya baik di birokrasi dan dunia kampus sangat

berpegang pada keputusan tersebut. Segala sesuatu jika berjalan tidak pada asas perimbangan maka berdampak terjadi demonstrasi bahkan aksi anarkis dan kekerasan bisa muncul kembali.

Kekuasaan dan ruang-ruang publik yang seharusnya membutuhkan kualifikasi dan sumber daya manusia untuk mengelolanya tidak lagi menjadi persyaratan melainkan perimbangan adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk menghindari pecahnya konflik. Hasil interview dengan salah satu informan berinisial F mengatakan apapun keputusan Malino adalah akumulasi dari sejumlah ketidakadilan yang terjadi sejak zaman kolonial yang terus di pelihara sehingga kesenjangan itu ada dan menjadi kecemburuan.

Salah satu akademisi Islam di sela-sela kegiatan workshop ia mengatakan salah satu dampak dari tertinggalnya orang Islam di Maluku dan Ambon secara umum karena faktor ideologi yang menganggap kafir jika menekuni pendidikan sejak zaman kolonial. Hal ini disatu sisi menunjukkan bahwa Islam sejak awal telah mengambil jarak dengan kaum penjajah dengan resiko akan terlambat dari segi pendidikan. Sebaliknya Kelompok masyarakat kristen yang selalu berbaur dengan penjajah dan menjadi anak emas mengalami kemajuan yang pesat. Kesalahan interpretasi berdampak pada keterbelakangan yang bisa saja itu menjadi benih kebencian diantara dua komunitas jika tidak di cermati secara bijak.

Pemukiman yang Tersegregasi Pasca Konflik 1999

Konflik Maluku dan kota Ambon secara khusus mengalami dampak signifikan pada wilayah pemukiman. Banyak wilayah tergusur, masyarakat Islam di beberapa tempat di daerah Kristen seperti di Desa Seri, Nusaniwe, Gunung Nona dan Karang Tagepe, Alinong, Amahuang, Mahia, (daerah kristen di wilayah desa Urimesing), serta beberapa tempat lain di Kota Ambon, seperti kudamati, Karang Panjang, Batu bulan, Batu Gaja, Batu Meja, Batu Gong, Wailiha, Wailete tergusur dan tidak kembali lagi. Hal yang sama juga terjadi pada komunitas kristen di beberapa tempat seperti Waihaong-Silale, Batu Merah, Tantui, Kebun Cengkih, Hila, Benteng Karang, Hitu dan Larike akhirnya harus keluar meninggalkan tempat mereka dan tidak kembali lagi.

Tidak kembalinya mereka ke lokasi pemukiman semula disebabkan karena berbagai aspek, ada yang menjual rumah dan tanah, ada yang hanya meminjam tempat untuk membangun

dan pada saat konflik itu dicabut. Namun tercatat ada salah satu tempat yakni desa lata yang berada di tengah pemukiman warga Kristen yang kembali ke tempat pemukiman mereka semula, sementara warga Benteng Karang, Hila dan Larike keluar meninggalkan tempat dan mendapat pemukiman baru. Secara otomatis peninggalan atau warisan yang secara adat dan hukum merupakan hak mereka tidak lagi dinikmati.

Warga Hila Kristen tidak kembali lagi ke daerah tersebut, namun gereja tetap dibangun pasca konflik hanya karena alasan situs sejarah. Hal yang sama juga terjadi dengan masjid di Paso yang dibangun namun tidak ada masyarakat Islam yang bermukim secara paten di daerah tersebut pasca konflik. Karenanya pasca konflik segregasi pemukiman walaupun dilihat sebagai resolusi konflik yang sifatnya sementara namun hal itu tidak berubah hingga saat ini.

Hal ini juga berpengaruh pada sekolah-sekolah dimana awal pasca konflik baik dari TK sampai SMA warga Muslim bersekolah pada sekolah-sekolah yang terletak di wilayah Muslim dan sebaliknya Kristen juga demikian. Belakangan ada siswa beragama Islam yang sekolah di wilayah kristen misalnya di SMA negeri 1 Ambon ada warga muslim yang bersekolah di sekolah tersebut. Demikian juga di SMP negeri 6 Ambon di Tanah tinggi daerah Kristen ada warga muslim yang bersekolah di daerah tersebut. Namun berdasarkan pengamatan peneliti tidak ada siswa Kristen yang bersekolah di SMA di kawasan Muslim seperti Batu Merah-Galunggung.

Gong Perdamaian: Simbol Belajar Berdamai

Kawasan pertokoan Pelita sebelum konflik termasuk salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang sebelum konflik para pedagang dari suku Bgis dan Jawa berpusat di lokasi tersebut selain adanya terminal taxi. Para pedagang tersebut adalah pengusaha pada bidang jahit menjahit, warung Makan serta salon kecantikan dan tempat cukur rambut. Masyarakat kelas menengah ke bawah yang sering kali bersentuhan dengan para pedagang pada lokasi ini karena harganya boleh dikatakan ekonomis. Karena itu Pertokoan Pelita banyak dikunjungi masyarakat kelas menengah ke bawah karena dari segi harga sangat terjangkau. Namun kawasan pasar ini hangus terbakar karena dibakar masa.

Setelah konflik pemerintah mengubah kawasan ini menjadi daerah monumental melalui

pembangunan Gong Perdamaian. Berdasarkan informasi yang peneliti temukan di lapangan, pembangunan Gong Perdamaian ini sebagai karya monumental untuk upaya pembangunan perdamaian di Maluku pasca Konflik 1999. Di tempat ini diharapkan masyarakat Maluku secara khusus di kota Ambon dapat bertemu dan belajar saling memaafkan dan hidup berdamai. Karya ini juga dibangun pasca peringatan HARGANAS nasional yang berlangsung di kota Ambon. Situs-situs perdamaian di bangun sebagai upaya membangun kembali Maluku secara damai.

Kawasan Gong Perdamaian yang tadinya diharapkan untuk membantu masyarakat Maluku belajar dan membangun kembali persaudaraan akhirnya juga berubah menjadi suatu tempat bersantai dan dijadikan tempat rekreasi. Hal ini sangat strategis karena terletak di pusat kota, dan bangunannya terkesan unik untuk dijadikan tempat berpose di depan kamera. Karena itu bagi pengunjung yang masuk di lokasi ini dikenakan pajak. Situs perdamaian yang diharapkan masyarakat dapat belajar bersama, hidup bersama, berubah menjadi tempat pariwisata, karenanya bagi pengunjung yang masuk tempat ini ditagih pajaknya.

Terjadi disorientasi pembangunan gong perdamaian dari fungsinya yang dapat dijadikan sebagai jembatan sosial menghubungkan dua komunitas yang berkonflik dalam ikatan persudaraan yang rukun. Ataukah memang untuk pembangunan suatu wilayah baik pariwisata dan ekonomi keduanya penting. Namun jika itu dikenakan pajak, maka yang memasuki kawasan itu hanya masyarakat tertentu yang punya uang dan karenanya kawasan ini berubah juga menjadi kawasan elit.

Inkonsistensi terhadap pembangunan ruang sosial sebagai jembatan perdamaian yang dipoles dengan kepentingan ekonomi dan politik akhirnya gong perdamaian bagaikan sebuah karya monumental yang tidak bermakna dalam kaitan dengan perdamaian. Di sisi lain dalam pendekatan budaya istilah gong tidak begitu kental dengan tradisi orang Maluku sendiri. Orang Maluku sangat kental dengan Tifa dan Tahuri (kulibia yang terbuat dari kerang) yang bunyinya sangat khas dan digunakan sebagai media informasi dan komunikasi. Karenanya penggunaan Gong perdamaian adalah sesuatu yang asing dan dari segi kultural merupakan sesuatu yang sifatnya imajinasi namun dari aspek politik harus diterima karena tidak ada kekuatan melawan intervensi penguasa.

Karena itu gong perdamaian adalah simbol perdamaian yang sifatnya semu. Karena sangat jauh dari kultur dan simbol yang sering dipakai oleh Orang Maluku. Mungkin jika istilah Gong diganti dengan Tifa nuansa dan maknanya akan lebih menyentuh masyarakat Maluku dan Kota Ambon dari dua komunitas. Hal ini cukup beralasan karena di depan masjid Batumerah masih terdapat tifa yang digunakan sebagai sarana komunikasi kepada umat islam untuk melakukan sholat. Pada daerah-adat islam dan kristen tifa masih digunakan untuk acara-acara adat selain tahuri yang telah disebutkan sebelumnya. Karena itu bagi peneliti proses pembangunan monument Gong perdamaian adalah suatu intervensi pusat yang cukup kuat melakukan penetrasi terhadap masyarakat. Di sini terlihat kuatnya negara dengan segala otoritasnya menekan dan mengontrol masyarakat namun terlihat lemah (Migdal, 1988).

Kuatnya negara dalam melakukan intervensi dan kontrol sosial dalam pola top down pada akhirnya kebijakan pembangunan gong perdamaian juga bisa di lihat sebagai politik pencitraan. Pencitraan tersebut berkaitan dengan perdamaian yang disimbolkan melalui gong. Karenanya gong perdamaian adalah petanda dan sekaligus penanda realitas sosial masyarakat pasca konflik yang hidup kembali aman dan damai. Namun tidak mempertimbangkan aspek kemajemukan sebagai realitas sosial konflik dan konteks kultural Maluku yang sifatnya majemuk. Karenanya Gong perdamaian pada akhirnya dijadikan sebagai tempat komersialisasi. Hal ini baik dalam kaitan dengan aspek ekonomi. Namun tujuan dari pembangunannya monument tersebut bukan pada sasaran ekonomi.

Pernyataan informan sebagaimana disebutkan gong perdamaian tidak lagi dijadikan sebagai tempat belajar bersama, bertemu dua komunitas, melainkan aspek pariwisata yang berpengaruh pada ekonomi. Bagaimana masyarakat mau belajar bersama pada tempat yang sudah sifatnya komersialisasi. Alasan lain juga disampaikan oleh salah satu informan lain bahwa Gong perdamaian terlalu asing buat kami di Maluku dan Ambon khususnya. Budaya kami adalah budaya tifa bukan budaya gong mengapa harus disebut gong perdamaian harusnya tifa perdamaian? Gong perdamaian tidak memberikan kontribusi apapun terhadap proses perdamaian pasca konflik. Bagi saya ada keterasingan budaya di sini.

Pendapat informan di atas bisa dikaitkan dengan pendapat Fukuyama yang mengatakan

bahwa kuatnya suatu negara dalam melakukan kontrol sosial dan intervensi kepada masyarakat harus memperhatikan kultur masyarakat tersebut (2001: 28). Karena itu kebijakan pembangunan monument tersebut tidak relevan dengan konteks Maluku maupun kota Ambon. Bertolak dari pendapat Fukuyama, maka aspek budaya adalah salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam konteks ini. Budaya yang dimaksudkan adalah bukan budaya yang semata merupakan warisan sejarah tetapi budaya yang selalu diadaptasikan dengan relaitas konteks yang memperhatikan aspek sejarah tetapi juga kondisi masa kini.

Dampak Segregasi Pemukiman Bagi Masyarakat

Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa segregasi pemukiman pasca konflik bertumpuh pada aspek agama membuka ruang untuk terciptanya politik identitas berbasis agama, bersamaan dengan hal itu perlu disadari juga bahwa segregasi pemukiman menunjukan secara tegas bahwa solidaritas keagamaan lebih kuat dari pada solidaritas kebudayaan dengan nilai-nilai kulturalnya.

Dalam konteks Maluku yang selalu membanggakan diri dengan budaya *pela-gandong* sebagai perekat dan pemersatu masyarakat ternyata tidak mampu membendung kekuatan fanatisme dan solidaritas keagamaan sehingga tragedi Januari 1999 meng-hancurkan dan meluluhlantakan sendi-sendi kehidupan masyarakat Maluku berbasis nilai budaya terbukti. Kohesi sosial masyarakat Maluku yang berbeda agama namun terikat dalam ikatan kekeluargaan berbasis *pela* dan *gandong* ternyata tidak mampu membendung sentimen dan fanatisme keagamaan.

Kejujuran terhadap realitas ini sulit ditemukan di tengah komunitas masyarakat Maluku beda agama. hasil interview dengan salah satu informan mengatakan bahwa:

“Orang kristen dan Islam Maluku punya *pride* tersendiri tentang budaya karena itu adalah warisan, Karena itu dalam konteks apapun *pela gandong* itu tetap menjadi pilihan dalam resolusi konflik.” (interview dengan salah satu informan S, 30 Juli 2016)

Pernyataan ini mengingatkan peneliti pada statement salah satu peneliti konflik yang mengatakan bahwa orang Maluku terlalu romantisme pada sesuatu yang sifatnya historis karena dianggap sebagai produk budaya dan

warisan leluhur, sehingga harus di pelihara. Dengan kata lain karena kebanggaan atau *pride* itu maka budaya *pela-gandong* tetap menjadi hal yang sifatnya romantisme bagi masyarakat Maluku. Hal ini dapat pula terlihat dari pernyataan berikut:

Bagi orang Maluku asli ada keinginan untuk kembali menjalin kehidupan seperti sebelum konflik. Ada semacam penyesalan melalui pernyataan. lebih baik kehidupan kita waktu dulu dari yang sekarang. Ada rasa saling percaya diantara masyarakat. Saat ini, masyarakat sudah jenuh dan tidak mau untuk diadu karena konflik harganya mahal. baik dari ekonomi, sosial budaya. Saat konflik transportasi dari Waihaong ke Kailolo terlalu mahal. Ini contoh faktor ekonomi. Ada alasan kultural. Romantisme akan memori hidup orang basudara di masa lampau menjadi inspirasi untuk membangun Maluku pasca konflik (Interview NB, 30 Juli 2016)

Pernyataan ini seakan ingin menegaskan bahwa ada rekayasa orang luar yang ingin menghancurkan budaya orang Maluku, sehingga muncul suatu kesadaran akan kehidupan masa lalu antara *salam-sarane*. Aikap bangga atau *pride* akan budaya tanpa melakukan suatu analisis kritis terhadap eksistensi budaya dalam konteks ruang dan waktu masa kini pada akhirnya orang lain diluar budaya Maluku yang disalahkan.

Pemukiman berbasis agama menunjukan bahwa kekuatan budaya yang terepresentasi melalui *pela-gandong* pada konteks masa kini hanyalah sebuah roman masa atau narasi budaya yang sifatnya absurd. Kebijakan apapun yang terkait dengan konteks ke-Maluku-an saat ini tidak lagi bertumpuh atau berbasis budaya melainkan berbasis agama. Hal ini agak kontras dengan pernyataan salah satu akademisi Maluku yang mengatakan bahwa *pela* sebagai budaya masih memiliki kekuatan pemersatu di Maluku. Hal ini terlihat dari saat konflik dan pasca konflik ritus panas *pela* selalu dilakukan oleh negeri-negeri berpela. Pernyataan ini jika di sikapi secara kritis maka pertanyaan berulang muncul dimanakah *pela* saat konflik dan mengapa pola pemukiman pasca konflik tidak dilakukan berbasis *pela* tetapi sebaliknya berbasis agama? Jadi tampak budaya (*pela-gandong*) tinggal kenangan, tetapi justru dengan agama dijadikan pilihan untuk merekatkan umat yang berbeda dan berkonflik.

Kondisi pasca konflik dengan pemukiman yang tersegregasi lebih menambah sifat rasa takut dan khawatir serta hidup penuh kecurigaan yang tinggi walaupun setiap orang sadar bahwa kita adalah saudara pula bahkan ada yang segandong (hubungan darah yang sama). Ketakutan dan kekhawatiran akan keselamatan diri jika berjalan di wilayah berbeda itu tidak ada karena alasan faktor budaya sebagaimana di tegaskan oleh informan berikut:

“orang Maluku asli jika berjalan ke tempat lain (kudamati) tidak merasa takut karena meyakini bahwa orang dikudamati tidak akan melakukan sesuatu yang mencelakai mereka. Hal ini disebabkan karena budaya Maluku itu masih kental. Namun budaya itu fatal sejak tahun 1999 karena sentiment agama.”

Pernyataan akhir dari informan di atas sebenarnya tersirat bahwa budaya itu telah dikalahkan oleh sentiment agama. Hal ini yang tidak diakui oleh hampir keseluruhan masyarakat Maluku bahkan pemerintah sekalipun. Hanya segelintir kecil orang yang menyadari dan mengakui hal itu. Padahal pola segregasi pemukiman masyarakat sejak zaman kolonial hingga konflik Maluku tahun 1999 menunjukkan bahwa kekuatan agama lebih kuat atau dengan kata lain sikap fanatisme keagamaan lebih kuat dari pada fanatisme suku atau etnis. Secara faktual pola pemukiman Maluku pasca konflik tahun 1999, diatur berdasarkan agama bukan suku, etnis dan lainnya.

Segregasi pemukiman Berbasis agama di kota Ambon semakin memperkuat solidaritas keagamaan dari pada solidaritas kultural menembusi ruang politik praktis. Dalam konteks politik lokal, faktor agama turut menentukan masyarakat kota ambon dalam melakukan pemilihan walikota yang selalu berbasis agama. hal ini dapat di lihat dari penuturan informan berikut ini:

Bagaimana bicara hidup bersama tapi faktanya tidak demikian selama ini. Contoh tidak mungkin orang Muslim akan menjadi walikota di Ambon.

Pernyataan ini menegaskan bahwa dalam konteks yang tidak segregasi saja masyarakat Maluku dan kota Ambon agama lebih kuat pengaruhnya sampai pada keputusan politis. Karena itu hidup bersama dalam budaya pula gandong tidak menjamin hidup yang damai yang sesungguhnya dalam konteks Maluku. Karena itu dalam konteks

Maluku dan kota Ambon secara khusus agama memiliki andil yang besar dalam penentuan segala sesuatu.

Hal ini juga yang ditegaskan dalam keputusan Malino sebagai resolusi konflik bahwa isu perimbangan yang menjadi salah satu keputusan Malino bukan isu budaya, melainkan isu agama. Hal ini berarti arena yang dominan dalam konteks Maluku adalah arena agama dan para peserta Malino adalah mereka yang memiliki modal sosial yakni pengetahuan yang relevan dengan konteks Maluku bahwa agama itu ternyata lebih kuat dominasinya dari isu yang lain seperti budaya. Banyak demonstrasi dari persoalan birokrasi, politik, bahkan dunia kampus sendiri selalu berkaitan dengan isu perimbangan agama Islam-Kristen, bukan pula atau gandong.

Segregasi Pemukiman Melanggengkan Trauma Masyarakat

Konflik 1999 yang diwarnai dengan berbagai tindak kekerasan fisik dan non fisik tidak saja menjadi catatan sejarah atau kolektif memori bagi masyarakat Maluku dan kota Ambon secara khusus. Banyak korban dan dampaknya yang signifikan tidak saja terkait dengan jatuhnya korban jiwa, penjarahan, pembakaran bahkan berdampak pada pola segregasi pemukiman yang terjadi hingga saat ini. Namun hal lain yang signifikan dampaknya bagi upaya membangun kepercayaan atau trust diantara sesama komunitas adalah munculnya rasa trauma masyarakat karena pengalaman konflik yang tidak saja bertindak sebagai pelaku, tetapi korban dan bahkan saksi sejarah atas pembunuhan, pembantaian, penembakan dan lainnya.

Dalam kondisi trauma atas peristiwa kekerasan yang secara mentalitas masyarakat rasakan, kondisi ini menjadi carut marut dan masyarakat berupaya menyelamatkan diri dari ancaman dengan cara mengungsi ke tempat yang aman. Hal yang terpikirkan adalah menyelamatkan diri pada lokasi pemukiman yang seagama, bukan suku, etnis. Masyarakat secara fisik terlindungi dan terselamatkan dengan pilihan tersebut, namun secara mental dan psikis, mereka sebenarnya mengalami trauma. Rasa takut dan hilang kepercayaan terhadap komunitas berbeda agama adalah kenyataan yang tidak bisa terhindari. Karenanya pasca konflik walaupun masyarakat telah membaur melalui sektor pasar, namun hal itu tidak berlaku pada sektor lainnya. Harta milik dua komunitas baik muslim maupun kristen dijual

karena alasan keamanan atau ditukar guling atau barter.

Mentalitas masyarakat yang traumatik diperparah dengan kebijakan segregasi pemukiman, di satu sisi merupakan pilihan yang baik untuk persoalan keamanan. Namun di lain sisi justru lebih menambah bertumbuhnya atau terpeliharanya rasa trauma itu yang nampak dalam sikap tidak percaya, takut, curiga kepada komunitas berbeda agama. Memori akan konflik tidak akan hilang dari ingatan masyarakat karena itu diwaktu-waktu tertentu rasa trauma itu akan muncul. Seperti contoh bagi komunitas Kristen untuk melewati jalur Batumerah pada saat takbiran dengan kondisi jalan yang macet merupakan suatu ancaman bagi mereka walaupun sebenarnya tidak apa-apa. Namun karena trauma itu menimbulkan rasa takut curiga dan memori konflik muncul lagi. Apalagi kehadiran aparat keamanan baik polisi maupun TNI berjaga-jaga di setiap wilayah saat itu lebih menambah rasa trauma itu. Hal ini dapat dilihat melalui penuturan informan berikut ini:

Beta memang takut karena trauma konflik itu belum hilang, apalagi suasana takbiran yang menggunakan atribut-atribut keagamaan dan bernuansa Timur Tengah. Misalnya menggunakan kaos, Suria, Arab, Afganistan seperti pada malam itu dengan teriakan Allah Akbar, hidup Palestina, bebaskan Palestina yang muncul dari kerumunan anak-anak yang bertakbir, menambah rasa takut (interview dengan informan D, 4 Agustus, 2016)

Pernyataan di atas memang sama dengan pengamatan yang dilakukan oleh informan lainnya yang saat itu yang sementara melintasi daerah Batu Merah saat malam takbiran. Ada rasa takut yang menegangkan. Memori konflik muncul lagi, kondisi jalan yang macet karena terlalu banyak orang yang melintasi jalan itu ditambah dengan kelompok takbiran dengan mobil dan motor yang sangat banyak. Hampir sekitar satu jam kami mengalami kemacetan di lokasi itu. Rasa takut semakin parah juga dengan kehadiran aparat keamanan yang berjaga-jaga, sehingga hati bertanya-tanya sebenarnya ada apa? Apakah hanya karena bertugas menjaga keamanan saat takbiran atau ada sesuatu? Hati mulai tenang ketika tiba di depan masjid Batu Merah, ternyata di situ ada pertunjukan budaya yang melibatkan komunitas anak muda desa Paso dan Batu Merah.

Informan tidak melakukan pengamatan dalam waktu yang lama karena rasa takut belum hilang. Namun dapat diprediksikan bahwa anak-anak muda yang melakukan pertunjukan budaya totobuang dan musik tradisional Islam di Batu Merah itu dilakukan oleh gabungan anak-anak dari dua komunitas tersebut karena alasan mereka adalah saudara pela. Dalam pentas musik tradisional dalam menyambut Idul Fitri saat takbiran terlihat penampilan anak-anak memainkan musik melantunkan pujian bernafaskan Islam tanpa melihat latar belakang mempersoalkan anak-anak muda perempuan yang memainkan totobuang tidak menggunakan Jilbab di depan masjid, sehingga informan berkesimpulan itu pemuda kristen asal Paso yang bergabung dengan saudara pelanya untuk memeriahkan malam takbiran dengan melantunkan Shalawat mengagungkan kebesaran Ilahi. Namun informan tidak bisa bertahan lama untuk melihat pertunjukan rohani yang begitu sahdu karena alasan adanya rasa takut yang menegangkan dengan keramaian yang ada.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa masyarakat masih sementara sakit dan trauma atas konflik 4 tahun silam, sehingga butuh perhatian yang tentunya terkait dengan penanganan secara psikososial untuk menyembuhkan luka dan trauma itu. Hal ini perlu dilakukan karena jika dibiarkan maka trauma itu akan menyebabkan orang saling curiga, tidak percaya, tidak aman. Karenanya relasi sosial tidak dapat berjalan secara normal di Masyarakat. Relasi sosial melalui hubungan pela-Gandong ternyata belum bisa menjamin keberadaan masyarakat untuk berada di suatu lokasi tertentu yang dianggap belum aman baginya. Karena itu Trauma, distrust dan lain-lain adalah penyakit psikososial yang sementara di alami oleh masyarakat Maluku secara khusus kota Ambon.

Hasil interview dengan salah satu informan berinisial Z dari komunitas Islam dikatakan bahwa menyembuhkan trauma, mengembalikan trust, rasa aman butuh waktu dan biar itu berjalan dengan waktu jangan dipaksakan. Pernyataan ini menegaskan juga bahwa kondisi psikososial masyarakat Maluku secara khusus kota Ambon, belum pulih normal seperti sebelum konflik. Kondisi ini yang perlu disadari oleh semua pihak bahwa kondisi psikososial masyarakat belum normal.

PENUTUP

Refleksi masyarakat Ambon Maluku terhadap segregasi pemukiman sifatnya bervariasi. Namun

hal ini menjadi fenomena menarik untuk diteliti karena beragam pendekatan sosial dalam ilmu sosial akan melahirkan beragam interpretasi dan sudut pandang terhadap realitas segregasi tersebut. Segregasi pemukiman adalah warisan sejarah yang menunjukkan bahwa masyarakat Ambon Maluku sebenarnya adalah masyarakat yang sering terjadi konflik dan tingkat kerawanan yang tinggi. Di zaman kolonial segregasi pemukiman dirancang sebagai salah satu bentuk pola yang dimainkan pemerintah kolonial untuk memecah masyarakat yang berbasis agama.

Pola segregasi juga dilakukan melalui simbol-simbol budaya, patah siwa-patalima, pela-gandong adalah bentuk segregasi pemukiman tanpa teritori secara geografis. Namun dalam kaitan dengan ikatan-ikatan kultural yang sifatnya terbatas disitulah segregasi terbentuk.

Segregasi pemukiman berdampak memperkuat identitas kolektif berbasis agama yang secara langsung melemahkan ikatan-ikatan kultural berbasis budaya lokal yang sering dibanggakan seperti pela-gandong, patasiwa-patalima. Agama menjadi salah satu alasan kuat pola segregasi pemukiman.

Segregasi Pemukiman melanggengkan kondisi psikososial masyarakat yang sakit. Secara psikologi masyarakat akan tetap trauma karena rasa takut yang tidak akan berakhir karena hidup yang terpisah secara agama. fanatisme dan curiga akan meningkat diantara masyarakat yang diperkuat dengan alasan ideology agama.

Segregasi pemukiman adalah arena yang paling mudah untuk masyarakat menjalankan aturan-aturan kegamaan. Disinilah identitas agama semakin menguat dari pada identitas kultural yang berbasis budaya pela-gandong.

Maluku pasca konflik membutuhkan ruang sosial yang terbuka luas untuk masyarakat, selain pentingnya penegakan hukum dan regulasi yang mengarah pada restorasi justice bagi kepentingan masyarakat, selain trauma healing. Keadilan dan mentalitas adalah dua hal penting yang juga dibutuhkan oleh masyarakat. Hak-hak politik dan hukum yang menjadi milik masyarakat perlu dikembalikan, sealing penyembuhan mental secara psikis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Keberadaan artikel ini tak terlepas dari kontribusi banyak pihak. Untuk itu, penulis menghaturkan banyak terima kasih pada informan,

budayawan, tokoh agama dan informan lainnya yang tak bisa penulis sebut satu persatu. Teriring harapan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam menata relasi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Andries. Flavius Floris, 2014, *Minoritas Dalam Masyarakat Majemuk*, Disertasi, Universitas Gadjah mada, Yogyakarta.
- Coser, Lewis A. 1956. *"The Functions of Social Conflict"*. Gleancoe, USA: the Free Press.
- Chandoke, Neera. 2001. *Civil and political in Civil Society*. Journal *"Democratization"*, volume 8 nomor 2.
- Creswell, John W. 2013. *"Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Diamond, Larri dan Platner Marc F. 2003. *Hubungan Civil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Fukuyama, Francis, 2005. *Memperkuat Negara Tata Pemerintahan Dan Tata Dunia Abad 2001*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. (28-38)
- Hayat, Bahrul. 2012. *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama*. Jakarta: PT. Saadah Cipta Mandiri, Cetakan Pertama.
- Migdal, Joe. 1988. *Strong and Weak State: State-Societies Relations and State Capabilities in the Third World*. Princenton: Princenton University Press
- Milles, M.B. and Huberman, M.A. 1984. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication
- Mujiburahman, 2009, *Legitimasi dan Kritik Pemikiran Keagamaan Djohan Effendi, di Dalam Merayakan Kebebasan Beragama*, ICRP, Jakarta
- Nasir, Muhammad. 2006. *"Islam dan Solidaritas Sosial dalam Sayyidul Ayyam"*, tgl. 17 Nopember. <http://sayyidulayyaam.blogspot.com/2006/11/islamdansolidaritassosial.html>.
- Subair, Amal, dan Moh. Yamin. Rumpa 2008, *Segregasi Pemukiman Berdasar Agama: Solusi atau Ancaman*. Yogyakarta: Graha Guru
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Tholhah, Imam. 2006. *"Memupuk Kerukunan dan Menepis Konflik Berbasis Masyarakat"* di

dalam Jurnal Harmoni, Volume 1 Nomor 4,
Oktober – Desember 2002

Yewangoe, Andreas A, 2009, *Regulasi Toleransi
Pluralisme Agama Di Indonesia*, Dalam Elsa
(ed) *Merayakan Kebebasan Beragama*, ICRP,
Jakarta.